

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. *Stakeholder* yang terlibat dalam tata kelola benih padi unggul lokal di Sumatera Barat terdiri atas *stakeholder* primer (BPSB, Dinas Pertanian Provinsi, kelompok tani/penangkar, dan pelaku usaha benih lokal) dan *stakeholder sekunder* (LSM, perguruan tinggi, lembaga litbang, dan institusi pendukung lainnya). Pemerintah melalui BPSB dan Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura memiliki dominasi pada aspek kebijakan dan regulasi. Sementara itu, kelompok tani/penangkar berada pada posisi yang lemah secara struktural maupun akses terhadap sumber daya, sehingga membutuhkan penguatan kapasitas dan ruang partisipatif dalam proses pengambilan keputusan.
2. Kolaborasi antar *stakeholder* dalam tata kelola benih saat ini belum mencapai bentuk ideal. Kolaborasi masih berada pada tingkat cooperation, yang bersifat transaksional dan fungsional, tanpa adanya kesamaan visi, komitmen bersama, maupun pengambilan keputusan kolektif. Kesenjangan peran dan pengaruh antarpihak menjadi faktor penghambat terbentuknya kolaborasi sejati (*collaboration*).
3. Faktor-faktor utama yang mempengaruhi tingkat kolaborasi adalah faktor ekonomi (ketersediaan stok benih, sistem pemasaran dan jaminan pasar), sosial (kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan), serta lingkungan (regulasi dan ekosistem inovasi). Di antara faktor tersebut, dimensi ekonomi dan kapasitas *stakeholder* lokal menempati prioritas utama untuk intervensi jangka pendek.
4. Peran perguruan tinggi, LSM, dan lembaga penelitian sangat krusial dalam membangun jembatan antara petani penangkar dengan pengambil kebijakan. Keterlibatan pihak ketiga ini dibutuhkan untuk melakukan pendampingan, penguatan kapasitas, advokasi kebijakan, serta mendorong transformasi kelembagaan kelompok tani menuju aktor kolaboratif yang setara.

5. Berdasarkan seluruh temuan tersebut, penelitian ini merumuskan sebuah model tata kelola kolaboratif benih padi unggul lokal, yang mengintegrasikan peran stakeholder secara sinergis dan setara, melalui pendekatan partisipatif, penguatan kapasitas, serta pembagian peran yang adil dalam setiap subsistem (pemuliaan, produksi, sertifikasi, distribusi, dan adopsi). Model ini berfungsi sebagai kerangka transformatif untuk menggeser tata kelola dari sistem yang bersifat hierarkis dan fragmented menuju sistem kolaboratif dan berkelanjutan.
6. Implementasi model yang ditawarkan berpotensi meningkatkan kualitas dan ketersediaan benih lokal, memperkuat daya saing kelompok tani penangkar sebagai produsen benih, serta mengurangi ketergantungan terhadap pasokan benih dari luar. Dengan demikian, model ini tidak hanya mendorong kemandirian benih, tetapi juga menjadi instrumen kebijakan pembangunan pertanian yang berpihak pada petani kecil.
7. Secara akademis, model ini memberikan kontribusi ilmiah baru dalam bidang *governance* dan pembangunan pertanian, khususnya dalam tujuan ke 2 SDGs yaitu no kelaparan, *collaborative seed governance* di negara berkembang. Model ini memperluas pemahaman terhadap mekanisme kolaborasi multi-aktor dalam sistem perbenihan berbasis lokal, serta memberikan pendekatan yang dapat direplikasi dalam konteks komoditas lain atau wilayah lain dengan karakteristik serupa.

B. Saran

Berdasarkan hasil temuan penelitian dan analisis, terdapat sejumlah rekomendasi strategis yang ditujukan kepada *stakeholder* dalam tata kelola benih lokal. Rekomendasi ini dirancang untuk memperkuat peran masing-masing aktor sekaligus membangun sinergi yang lebih efektif dalam sistem perbenihan. Dengan pendekatan kolaboratif, setiap pihak diharapkan dapat mengambil peran sesuai kapasitasnya sehingga keberlanjutan produksi, distribusi, dan pemanfaatan benih lokal dapat terjamin. Adapun rekomendasi tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut:

Bagi Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota):

1. Mendorong penerapan model tata kelola kolaboratif dalam kebijakan perbenihan melalui regulasi yang mengatur pembagian peran secara seimbang antara pemerintah, kelompok tani, perguruan tinggi, dan swasta.
2. Menyediakan platform komunikasi dan forum kolaboratif yang memungkinkan para *stakeholder* duduk bersama dalam perencanaan, pemantauan, dan evaluasi sistem benih.
3. Memperluas dukungan pendampingan teknis dan manajerial kepada kelompok tani penangkar melalui penyuluh, balai benih, dan tenaga ahli di lapangan.

Bagi Kelompok Tani dan Petani Penangkar:

4. Meningkatkan kemampuan organisasi melalui pelatihan dalam manajemen produksi benih, administrasi, pemasaran, dan pemanfaatan teknologi digital.
5. Mengembangkan konsolidasi antar kelompok tani dalam bentuk koperasi atau asosiasi untuk memperkuat posisi tawar terhadap pasar dan kebijakan.

Bagi Perguruan Tinggi dan Lembaga Riset:

6. Berperan aktif sebagai mitra strategis dalam riset terapan, pengembangan varietas lokal unggul, dan diseminasi inovasi kepada kelompok tani.
7. Mendorong program pengabdian masyarakat yang berfokus pada transformasi kelembagaan kelompok tani dari sekadar produsen ke aktor kolaboratif dalam sistem tata kelola.

Bagi LSM dan Sektor Swasta:

8. Menjadi mitra advokasi dan fasilitator dalam penguatan kapasitas kelembagaan petani, serta membuka jalur kemitraan untuk rantai pasok benih lokal yang berkelanjutan.
9. Mendorong inovasi pembiayaan dan model bisnis yang mendukung produksi dan distribusi benih lokal secara adil dan inklusif.

Bagi Pemerintah Pusat:

10. Meninjau kembali skema bantuan benih nasional agar lebih adaptif terhadap kondisi lokal, serta membuka ruang bagi partisipasi penangkar lokal dalam rantai distribusi benih bersubsidi.

11. Memperkuat peran Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB) dan lembaga sertifikasi untuk lebih responsif terhadap pengembangan benih lokal, bukan hanya varietas unggul nasional.

Untuk Penelitian Selanjutnya:

12. Penelitian lanjutan dapat mengembangkan mekanisme implementasi model kolaboratif ini di wilayah lain atau untuk komoditas pertanian lainnya.
13. Diperlukan riset lebih lanjut tentang dampak ekonomi dan sosial dari model ini jika diterapkan secara penuh, termasuk pada aspek gender, kesejahteraan petani, dan keberlanjutan lingkungan.

